



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 12 (Dua Belas)
- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : V
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang.
- Hari, Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
- Pukul : 10.00 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka.
- Pimpinan Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A./ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I It 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
- A c a r a : Pembahasan mengenai :
1. Pembahasan RKP dan RKAKL Kementerian Koperasi dan UKM RI, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Tahun Anggaran 2025;
 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023 dan realisasi anggaran semester I Tahun 2024; dan
 3. Lain-lain.
- Hadir : 1. 20 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Menteri Koperasi dan UKM RI, Sdr. Teten Masduki;
3. Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono;
4. Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa;
5. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi;
6. Wakil Kepala BPKS Sabang, Abdul Manan.
- Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang beserta jajarannya pada Pukul 11.11 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 10 Juni 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Martin Manurung, S.E., M.A. Selanjutnya Rapat dipimpin oleh Bapak Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.937.166.229.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.330.611.679.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - b. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi sebesar Rp.606.554.550.000,- (*Enam Ratus Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terkait usulan rekomposisi Pagu Indikatif Tahun 2025 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.937.166.229.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.388.237.258.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- b. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi sebesar Rp.548.928.971.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terkait tambahan anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp.665.028.702.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan non prioritas yang belum terakomodir pada Pagu Indikatif Tahun 2025.
4. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.223.867.121.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp158.451.613.000,- (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
 - b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp65.415.508.000,- (*Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.105.373.198.000,- (*Seratus Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
 - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha Sebesar Rp.23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp.81.677.561.000,- (*Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

6. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait tambahan anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp.419.766.081.000,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk mencapai target *outcome* KPPU.
7. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 dan Menteri Keuangan No. S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.2.062.506.461.000,- (*Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
 - a. Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp.906.514.280.000,- (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Sebesar Rp.1.155.992.181.000,- (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
8. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terkait tambahan anggaran Tahun 2025 Rupiah Murni yang digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan dana pengembangan Proyek Strategis Nasional sebesar Rp.1.050.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah*).
9. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 dan Menteri Keuangan No. S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.53.494.482.000,- (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
 - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.13.195.109.000,- (*Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah*).
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.40.299.373.000,- (*Empat Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

10. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 dan Menteri Keuangan No. S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024, Pagu Indikatif Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.53.494.482.000,- (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
- a. Program Pengembangan Kawasan Strategis yang semula diajukan sebesar Rp.13.195.109.000,- (*Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah*) disetujui untuk dilakukan rekomposisi menjadi sebesar Rp.15.813.191.000,- (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - b. Program Dukungan Manajemen yang semula diajukan sebesar Rp.40.299.373.000,- (*Empat Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) disetujui untuk dilakukan rekomposisi menjadi sebesar Rp.37.681.291.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
11. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terkait tambahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.89.450.000.000,- (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang digunakan untuk Program Pengembangan Strategis Nasional.
12. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM, BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 15.15 WIB.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI

Ttd.

TETEN MASDUKI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A
A-352**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL (BSN)**

Ttd.

DONNY PURNOMO JANUARDHI. E

**KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU)**

Ttd.

FANSHURULLAH ASA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM
(BP BATAM)**

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**WAKIL KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS SABANG)**

Ttd.

ABDUL MANAN